

PENGUATAAN KARAKTER ANTIKORUPSI MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN PENULISAN DAN PENERBITAN ANTOLOGI PUISI BAGI SISWA SMP DI SALATIGA

Chafit Ulya dan Yant Mujiyanto

Universitas Sebelas Maret

Surel: *chafit.u@gmail.com*

ABSTRAK

Indonesia tengah mengalami masa darurat korupsi. Catatan kasus korupsi semakin hari semakin bertambah banyak. Motif tindakan korupsi pun semakin beragam, canggih, dan sistematis. Untuk mengatasinya, tidak cukup hanya mengandalkan upaya penegak hukum melalui tindakan-tindakan represif, tetapi juga preventif yang melibatkan elemen-elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah korupsi adalah melalui program penguatan karakter antikorupsi berbasis pendampingan penulisan dan publikasi antologi puisi. Tujuan program ini adalah (1) meningkatkan kemampuan siswa SMP Kota Salatiga dalam menulis puisi antikorupsi; (2) menguatkan karakter antikorupsi siswa SMP Kota Salatiga melalui kegiatan pendampingan penulisan puisi; (3) meningkatkan motivasi siswa dalam menulis puisi melalui publikasi antologi puisi antikorupsi. Program ditujukan bagi siswa di SMP Negeri 3 Pabelan dan SMP Negeri 3 Tuntang. Tahapan dalam melaksanakan program terdiri atas tiga tahap besar, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil yang diperoleh dari program ini adalah sebagai berikut. (1) Kemampuan siswa dalam menulis puisi meningkat; (2) karakter antikorupsi yang dikembangkan dalam proses penulisan puisi antara lain kejujuran, keberanian, kepekaan, dan tanggung jawab. (3) Motivasi siswa dalam menulis puisi meningkat dengan adanya buku kumpulan puisi yang mereka ciptakan. Program ini diharapkan dapat senantiasa ditindaklanjuti guna lebih menguatkan karakter antikorupsi siswa sehingga ke depannya, mata rantai korupsi ini sedikit demi sedikit dapat dipupus.

Kata Kunci: pendidikan antikorupsi, karakter antikorupsi, penulisan puisi, siswa SMP.

Pendahuluan

Indonesia tengah mengalami masa darurat korupsi. Hal ini tidak lain disebabkan oleh maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Motif tindakan korupsi pun semakin beragam, canggih, dan sistematis. Bukti pernyataan ini dapat disaksikan melalui liputan-liputan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah praktik korupsi juga mengalami hal yang sama. *Transparency International* (TI) menemukan bahwa skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia secara pelan naik 1 poin dari tahun sebelumnya (<http://www.ti.or.id>). Namun demikian, rentetan kasus korupsi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan setiap tahunnya. ICW mencatat bahwa pada semester I tahun 2016 (Januari – Juni) saja, 500 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh tiga institusi penegak hukum

(<http://www.antikorupsi.org>). Ironi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan secara efektif.

Oleh karenanya, selain strategi-strategi pemberantasan korupsi, diperlukan pula strategi pencegahan serta sinergisitas berbagai elemen masyarakat untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, *Transparency International Indonesia* (TII) merekomendasikan sembilan poin upaya pemberantasan korupsi. Dari sembilan poin tersebut, poin kesembilan memiliki arti cukup besar dalam program ini, yakni masyarakat sipil diminta untuk melanjutkan penguatan gerakan sosial melawan korupsi ke berbagai kelompok masyarakat sebagai wujud kontrol warga terhadap pemerintah (<http://www.ti.or.id>). Rekomendasi tersebut mengindikasikan pentingnya upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan budaya (*cultural approach*) dengan melibatkan masyarakat dalam upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menjadikan pendekatan budaya sebagai salah satu alternatif yang dikedepankan sebagai upaya preventif. Selain pendekatan budaya, ada tiga pendekatan lain, yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis, pendekatan pasar atau ekonomi, dan pendekatan budaya (Wijayanto, dalam Sofia, 2011: 3). Namun, empat pendekatan tersebut, pendekatan budaya menjadi satu-satunya pendekatan yang memiliki efek jangka panjang. Pendekatan budaya inilah yang melatarbelakangi lahirnya gagasan untuk menginternalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah.

Pendidikan menjadi pilihan upaya pencegahan korupsi karena pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi (Sofia, 2011:4). Internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang korupsi dan penanganannya sejak dini.

Selanjutnya, berkaitan dengan puisi, lahirnya Gerakan Puisi Menolak Korupsi menunjukkan bahwa puisi memiliki kekuatan besar untuk turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa puisi mampu mempengaruhi tatanan sosial politik suatu bangsa. Anedo (2011: 281) menemukan bahwa puisi dapat dijadikan senjata ampuh untuk menyatukan bangsa. Bahkan, puisi-puisi bernada protes dapat pula mengubah sistem politik suatu negara (Srestha, 2000: 259). Di Indonesia, kita mengenal penyair W.S. Rendra yang mampu menggoyang kediktatoran pemerintahan Orde Baru melalui puisinya. "Mereka justru hanya memiliki senjata, kita punya kata" (Rendra, dalam Horison No. 11, 1982, 538).

Puisi, sebagaimana karya sastra yang lain, mengutamakan nilai kepekaan, kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kerja keras, kreativitas, dan nilai-nilai luhur lainnya dalam proses penciptaannya. Nilai-nilai luhur inilah yang dapat diteladani siswa-siswi SMP Kota Salatiga untuk menumbuhkan karakter antikorupsi dalam diri mereka. Proses melahirkan karya puisi mengandung karakter antikorupsi yang dapat diinternalisasi. Apalagi, jika karya yang dibuat adalah puisi-puisi bertema antikorupsi serta dibukukan dalam antologi puisi. Dokumentasi karya dalam wujud buku ini akan menjadi dokumen sejarah yang akan selalu diingat oleh para siswa. Buku tersebut akan menjadi bukti, janji, dan komitmen siswa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan puisi di Indonesia. Oleh karena itu, program pendampingan penulisan dan publikasi antologi puisi ini memiliki arti penting bagi upaya penguatan karakter antikorupsi di kalangan siswa SMP Kota Salatiga. Meskipun dalam lingkup yang terbatas, sumbangsih program ini diharapkan mampu turut andil dalam memutus mata rantai korupsi di Indonesia.

Tujuan umum program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menguatkan karakter antikorupsi di kalangan siswa SMP Kota Salatiga melalui pendampingan penulisan dan publikasi antologi puisi dengan pendekatan saintifik. Sementara itu, tujuan khusus program ini adalah (1) meningkatkan kemampuan siswa SMP Kota Salatiga dalam menulis puisi antikorupsi; (2) menguatkan karakter antikorupsi siswa SMP Kota Salatiga melalui kegiatan pendampingan penulisan puisi; (3) meningkatkan motivasi siswa dalam menulis puisi melalui publikasi antologi puisi antikorupsi.

Landasan Teori

Korupsi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Secara spesifik, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 korupsi dinyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Rinaldi, dkk. (2007: 18) mengemukakan beberapa modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, di antaranya: (1) memperbanyak/memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan

anggota dewan; (2) menyalurkan dana APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif; (3) manipulasi bukti perjalanan dinas; (4) penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur; (5) penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah; (6) manipulasi sisa APBD; (7) manipulasi dalam proses pengadaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Silaen dan Sasana (2013: 1) yang menemukan bahwa kasus korupsi di Jawa Tengah telah menyebar luas ke semua sektor antara lain anggaran daerah, infrastruktur, bantuan sosial dan pendidikan dengan presentase tertinggi pada anggaran daerah. Korupsi memang menjadi persoalan besar bagi negara yang tengah berkembang sebagaimana ditemukan oleh Waluyo (2010: 166) bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kasus korupsi.

Banyak pihak menduga perilaku korupsi pada pejabat negara dipengaruhi oleh sistem politik yang berkembang di negara tersebut. Berbagai praktik kecurangan dalam pemilu menyebabkan para pejabat yang terpilih menduduki tampuk kekuasaan cenderung mempergunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadinya (Mulgan, 2006: 1). Merajalelanya kasus korupsi yang terjadi menjadikan tindakan ini harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Larmour (2006: 7-10) menjelaskan bahwa menangani masalah korupsi diibaratkan dengan mengobati suatu penyakit. Untuk dapat mengobatinya, seorang dokter harus mendiagnosis dulu jenis penyakit dan penyebabnya sehingga dapat memberikan resep yang sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Larmour memberikan beberapa alternatif pendekatan untuk mendiagnosis penyebab dan cara mengatasi masalah korupsi, yaitu pendekatan klasik, ekonomi, pelayanan publik, politik, dan kriminal. Namun, di akhir pernyataannya, ia menggarisbawahi bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu pendekatan, tetapi membutuhkan multidisiplin ilmu dan pendekatan.

Di Indonesia, berbagai upaya telah diupayakan untuk meredam tindak korupsi ini, mulai dari pendekatan hukum, pendekatan bisnis, pendekatan pasar atau ekonomi, sampai pada pendekatan budaya (Wijayanto dalam Sofia, 2011: 5). Untuk mengimplementasikan pendekatan keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mempertimbangkan pendekatan budaya (*cultural approach*) sebagai strategi untuk menanggulangi masalah korupsi. Salah satu misi yang diusung adalah dengan mengonsepsi pendidikan antikorupsi dengan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mitra.

Upaya mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dapat dilakukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi (Manurung, 2012: 243). Pada tingkat pendidikan tinggi, mata kuliah pendidikan antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa (Sofia, 2011: 5). Wickberg (2013: 2) menegaskan pentingnya menitikkan upaya pencegahan perilaku korup pada mahasiswa selaku generasi muda dilandasi alasan bahwa generasi muda merupakan kelompok usia terbesar penduduk di sejumlah negara. Hal ini memberikan penguatan bahwa generasi muda haruslah dilibatkan dalam upaya-upaya perubahan masalah sosial, tak terkecuali upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi memiliki posisi strategis di dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu. Setidaknya ada 9 (sembilan) nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan (Bura dan Puspito, 2011: 75). Lebih lanjut, dikatakan bahwa setelah memahami nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, perlu juga dikemukakan prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi (Bura dan Puspito, 2011: 81).

Wacana munculnya pendidikan antikorupsi tidak serta merta diterima begitu saja oleh semua kalangan. Di samping pihak-pihak yang mendukung, ada pula yang masih bersikap pesimis terhadap efektivitas program tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih rentannya dunia pendidikan Indonesia terhadap praktik-praktik korupsi.

Internalisasi pendidikan antikorupsi akan menjadi lebih efektif apabila siswa ditunjukkan secara konkret keteladanan perilaku antikorupsi dari guru, kepala sekolah, dan elemen lainnya (Tanjung, 2009: 1-6). Pendapat di atas tidak dapat dianggap salah mengingat pada kenyataannya masih banyak kecurangan terjadi di dunia pendidikan kita. Berkaitan dengan hal tersebut, patut diperhatikan pendapat Suwarno, dkk. (2010: 109) bahwa sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan. Konflik kepentingan inilah yang mungkin masih menjangkiti dunia pendidikan kita sehingga

timbul pesimisme terhadap upaya KPK menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai strategi pemberantasan korupsi.

Dewantara (2011: 10) secara objektif memandang pro-kontra terhadap penerapan pendidikan antikorupsi. Pada satu sisi, ia menyadari bahwa dunia pendidikan kita belum siap mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara nyata mengingat masih maraknya praktik-praktik korupsi yang ada di dalamnya, baik dalam skala kecil maupun besar. Implementasi pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila dibarengi dengan keteladanan. Namun, di sisi lain, Dewantara pun menyambut positif upaya pencegahan korupsi sejak dini ini yang dicetuskan oleh pemerintah tersebut. Cara paling bijaksana untuk menyukseskan program tersebut adalah dengan memulai sikap antikorupsi dari hal-hal terkecil, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.

Terlepas dari perdebatan tentang pendidikan antikorupsi, beberapa catatan telah merekam pentingnya upaya internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah, khususnya berkaitan dengan mata pelajaran PKn. Pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn bertujuan untuk menanamkan karakter kejujuran siswa melalui desain pembelajaran yang dikembangkan oleh guru (Murdiono, 2016: 182). Pada tingkat pendidikan tinggi, Ulya, dkk. (2016: 60) memotret muatan pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah Kajian dan Apresiasi Puisi di Jawa Tengah dan DIY. Artinya, internalisasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran perlu diupayakan sebagai bagian dari tindakan pencegahan terhadap korupsi.

Metode

Program pendampingan penulisan dan publikasi antologi puisi ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang, tepatnya di SMP Negeri 3 Pabelan dan SMP Negeri 3 Tuntang. Secara geografis, kedua sekolah tersebut memang berada di wilayah Kab. Semarang. Akan tetapi, secara sosiologis dan budaya, masyarakat di daerah sekitar lebih dekat dengan Salatiga. Oleh karena itu, pada judul program disebutkan bahwa wilayah yang dijadikan setting program adalah Kota Salatiga. Subjek program ini adalah siswa di kedua sekolah dengan masing-masing berjumlah 30 siswa.

Prosedur yang digunakan dalam program ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi kegiatan survei awal ke lokasi dalam rangka menggali dan mendapatkan data konkret subjek target program. Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga kegiatan besar, yakni pelatihan (*workshop I*), *review* karya (*workshop II*), dan penerbitan karya. Pelatihan (*workshop I*) dilaksanakan sebagai bekal awal

untuk memperkuat karakter antikorupsi siswa melalui pelatihan penulisan puisi berbasis pendidikan antikorupsi. Karya puisi siswa yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan I akan di-*review* untuk melihat kesesuaian dengan target dan tujuan awal yang direncanakan. *Review* karya ini sekaligus dijadikan media untuk memperbaiki karya puisi yang ditulis oleh siswa. Pada tahap berikutnya, puisi-puisi yang ditulis oleh siswa diterbitkan menjadi sebuah buku kumpulan puisi berbasis pendidikan antikorupsi. Pada tahap evaluasi, dilakukan refleksi untuk mengukur tingkat keberhasilan atas program yang sudah dilaksanakan. Hasil refleksi ini digunakan sebagai tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

Menulis puisi membutuhkan keberanian: keberanian mengekspresikan gagasan dan keberanian memainkan kata. Inilah kunci menulis puisi yang ditawarkan kepada para siswa SMP di Salatiga. Pada awalnya, siswa-siswa SMP di Salatiga, sebagaimana umumnya siswa atau penulis pemula, tidak berani memunculkan gagasan baru yang original. Mereka biasanya masih terkungkung pada tataran konsep umum yang dipercayai sebagai dogma. Melalui program ini, kepercayaan diri siswa dibangun. Keberanian mereka dibangkitkan agar mampu melahirkan karya puisi sebagai suatu karya yang penuh makna.

Untuk membangkitkan keberanian tersebut, dilakukanlah program pendampingan penulisan dan publikasi antologi puisi antikorupsi. Skenario yang disusun untuk mengembangkan program ini adalah melalui kegiatan workshop penulisan puisi. Berikut adalah gambaran pelaksanaan workshop tersebut.

Pada bagian awal, siswa diajak mengeksplorasi pemahaman mereka tentang definisi konseptual puisi. Awalnya siswa masih tampak ragu atau kurang percaya diri. Namun, seiring berjalannya waktu, mulailah keberanian siswa untuk berpendapat tentang pengertian puisi. Beberapa siswa tampak mulai berani berpendapat. Mereka mengatakan, “Puisi adalah rangkaian kata”, “Puisi adalah rangkaian kata-kata indah”, “Puisi adalah inspirasi”. Setelah berani mengutarakan definisi puisi menurut pemahaman dan keyakinan mereka, siswa dituntut untuk mempertanggungjawabkan definisi yang sudah dibuat. Masing-masing dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi seputar definisi tersebut.

Ini adalah contoh konkret di mana proses penanaman karakter kepada peserta didik tidak secara teoretis, tetapi secara implementatif melalui penguatan sikap mereka terhadap suatu fenomena. Pada bagian awal ini, siswa sudah mulai dikenalkan dengan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian. Hal ini tentu menjadi modal penting di dalam upaya penguatan karakter antikosupsi siswa.

Kembali pada persoalan workshop di atas, langkah berikutnya adalah siswa diminta menulis puisi secara bebas dalam waktu lima belas menit. Tugas ini sepertinya tidak terlalu sulit bagi siswa. Tidak sampai lima belas menit, tugas menulis puisi pun berhasil mereka selesaikan. Puisi-puisi tersebut kemudian dikumpulkan dan dipilah-pilah berdasarkan tema-tema besar. Dari 30 puisi yang terkumpul, ada dua tema besar yang dipilih oleh mayoritas siswa, yaitu ibu dan keindahan alam. Di antara puisi-puisi tersebut, dipilihlah puisi bertema ibu sebagai contoh puisi yang dibahas. Beberapa siswa yang menulis puisi bertema ibu diminta untuk membacakannya secara keras. Berikut adalah beberapa puisi bertema ibu yang dibahas.

Ibu

Bagas Candra Saputra

Oh Ibu...

Engkau mengandungku selama sembilan bulan

Engkau melahirkanku dengan mempertaruhkan nyawa

Ketika aku lahir kau timang aku

.....

Ibu

Muhammad Syaefudin

Oh Ibu...

Kaulah wanita yang sangat mulia

Kaulah yang mengandungku selama sembilan bulan

Kaulah yang menggendongku ketika aku masih kecil

.....

Ibu

Wahyu Aris

Ibu....

Kau adalah pahlawan bagi hidupku

Kau mengandungku selama sembilan bulan

Ibu kau korbankan nyawamu untuk melahirkanku ke dunia

Dari tiga potongan puisi tentang ibu di atas, secara sepintas ada kemiripan-kemiripan: gagasan dan teknik penulisan. Terdapat kesamaan pandangan di antara mereka tentang sosok ibu, yakni bahwa ibu adalah perempuan yang telah mengandung anaknya selama sembilan bulan, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, dan merawat anaknya dari kecil hingga besar. Secara teknik, kemiripan itu tampak pada kesamaan judul dan tipografi. Tiga puisi di atas menggunakan judul yang sama, yaitu “Ibu”. Selain itu, tipografi ketiga puisi tersebut juga memiliki kemiripan. Ketiganya diawali dengan kata “(Oh) Ibu....”

Dari ketiga puisi di atas, dapat diketahui bahwa siswa kurang berani untuk mengembangkan gagasan di dalam puisinya. Kemiripan-kemiripan tersebut menunjukkan bahwa siswa seperti terkungkung pada konsep umum yang mereka pahami tentang sosok ibu. Siswa belum berani keluar dari zona nyaman atas puisi yang ditulis. Padahal, sumber gagasan dan inspirasi mereka berbeda-beda. Setiap siswa tentunya memiliki ibu dengan karakter masing-masing yang berbeda. Namun demikian, mengapa hasil puisi yang ditulis cenderung sama. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum melibatkan kepekaan di dalam menulis puisi. Dasar mereka menulis puisi hanyalah pengetahuan dan pemahaman umum tentang suatu hal. Mereka belum berani atau mungkin belum mengetahui bahwa untuk menghasilkan puisi yang baik, selain pengetahuan, dibutuhkan pula kepekaan terhadap sesuatu yang mereka lihat, rasakan, dan alami secara langsung.

Ketika siswa mampu memanfaatkan kepekaan, mungkin akan tercipta ujaran-ujaran khas yang unik, seperti *kasih sayangmu bergelombang sepanjang masa, meski rambutmu telah memudar tidak demikian dengan pengorbananmu, aroma sedap sambal terasimu akan terkenang sepanjang usiaku*, dan sebagainya. Keberanian dan kepekaan inilah modal untuk menghasilkan puisi yang indah. Jadi, setidaknya sudah ada tiga karakter yang dikembangkan selama proses menulis puisi ini, yaitu keberanian, tanggung jawab, dan kepekaan.

Selanjutnya, memasuki tema antikorupsi, siswa terlebih dahulu dikenalkan dengan korupsi. Kemudian, mereka diminta menulis puisi tentang korupsi dengan teknik menulis paralel. Setiap siswa diminta menulis satu bait puisi tentang korupsi selama sepuluh menit. Setelah selesai, puisi tersebut selanjutnya diputar beberapa hitungan sehingga berpindah tangan pada siswa lainnya. Siswa pun kemudian diminta melanjutkan puisi yang sudah ditulis temannya

Mementingkan Diri Sendiri

Korupsi tindakan yang dapat menyusahkan banyak masyarakat

Dengan berkembangnya zaman

Semakin banyak para koruptor-koruptor yang tidak bertanggung jawab

Sampai kapankah negara ini bisa maju

Tanpa melakukan korupsi

Bila tidak ada korupsi

Negara ini pasti akan maju

Semoga saja hari ini dan selanjutnya

Tidak ada yang korupsi

Anti korupsi

Puisi di atas merupakan karya bersama tiga siswa. Satu siswa menulis bait pertama, satu siswa menulis bait kedua, dan satu lagi menuliskan judulnya. Puisi tersebut selanjutnya dikaji untuk mengetahui kualitas estetis yang dihasilkan. Proses menulis puisi secara paralel rupanya masih terlalu sulit bagi siswa. Contoh puisi di atas menunjukkan tidak adanya kesinambungan antarbagian. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak membangun satu konsep gagasan yang utuh. Selain itu, kekuatan kata yang ditimbulkan dari puisi di atas juga masih sangat lemah. Banyak kata mubazir yang digunakan siswa, selain muncul pula kata-kata yang tidak tepat, baik secara makna maupun secara rima. Padahal, puisi membutuhkan pemadatan kata.

Oleh karena itulah, pada kesempatan ini, siswa diajak untuk berlatih memadatkan dan memilih kata secara tepat. Langkah pertama, siswa diminta membuang kata-kata yang tidak perlu. Beberapa kata pun dihilangkan, seperti kata *yang*, *dapat*, dan *banyak* (baris 1), *dengan* (baris 2), *para*, *koruptor*, dan *yang* (baris 3), *sampai* dan *ini* (baris 4), *melakukan* (baris 5), *ini* dan *pasti* (baris 7), *saja* (baris 8), serta *yang* (baris 9). Setelah itu, siswa diajak untuk mengganti beberapa kata dengan kata-kata yang lebih tepat, seperti *menyusahkan* (baris 1) diganti dengan *merugikan*, *korupsi* (baris 6) diganti dengan *koruptor*.

Proses ini memberikan pembelajaran kepada para siswa bahwa menulis puisi selain melibatkan pengetahuan dan perasaan, juga harus disertai dengan kemampuan memadatkan kata. Bagi para pemula seperti siswa SMP, cara terbaik untuk memadatkan kata adalah dengan menulis puisi dengan sebanyak mungkin kata lalu menyederhanakannya dengan cara menghilangkan kata-kata yang tidak dibutuhkan. Teknik lain yang diperlukan adalah kemampuan memberikan kesan dan perasaan dalam puisi. Teknik ini berkaitan dengan kemampuan memilih dan memilah kata yang memiliki kemampuan menimbulkan efek estetis dan dramatis dalam puisi. Juga memilih kata dengan tingkatan makna yang setepat-tepatnya.

Tahap terakhir dari proses ini adalah siswa ditugaskan untuk menulis puisi dengan tema korupsi. Agar menghasilkan tulisan dengan kualitas yang baik, tugas ini dikerjakan siswa di rumah. Berikut adalah salah satu contoh puisi yang ditulis oleh siswa.

Tangisan Rakyat

Zanuar Al Anhar

Apakah tak terdengar di telinga bapak?

Suara tangisan anak jalanan

Tangisan rakyat, mengharap hidup layak

Takkah tergetar hati bapak

Untuk menyudahi kejahatan ini

Kau makan uang kami

Kau rampas hak-hak kami

Negara rugi banyak

Karena korupsi yang bapak lakukan

Sudahilah kejahatan ini

Sebelum bapak masuk bui

Puisi di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan siswa di dalam menulis puisi. Ada peningkatan kualitas puisi yang diciptakan. Puisi tersebut sudah memperlihatkan keberanian penulis di dalam mengonsep gagasan dan memilih kata. Rima puisi pun sudah lebih kelihatan. Selain itu, kata-kata yang dipakai juga tidak menunjukkan kemubaziran yang menandai adanya pepadatan kata di dalamnya.

Proses yang sudah dijalani oleh siswa ini dipercaya mampu meningkatkan atau menguatkan karakter antikorupsi siswa. Melalui program pendampingan ini, siswa dibangkitkan motivasinya, keberaniannya, kepekaannya, dan tanggung jawabnya terhadap segala sesuatu yang dilihat, dirasakan, dan dialaminya. Karakter-karakter tersebut memang selalu melekat di dalam proses menulis puisi. Maka, ketika siswa dibekali dengan keterampilan menulis puisi, karakter-karakter tersebut akan semakin mantap terinternalisasi dalam diri siswa. Ketika karakter-karakter luhur tersebut sudah tertanam kuat, rasanya mustahil korupsi akan mampu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Apalagi, mereka telah mampu mengekspresikan kekecewaan, ketidaksukaan, dan kemarahan terhadap perilaku korupsi melalui puisi. Terlebih lagi ketika puisi antikorupsi tersebut didokumentasikan dalam sebuah buku, rasa-rasanya tidak mungkin mereka berani bertindak koruptif di masa mendatang.

Namun demikian, kemungkinan buruk tersebut tentunya masih ada karena korupsi bukan melulu soal penyelewengan dana milyaran, ratusan, atau puluhan juta. Virus korupsi dapat menyebar melalui praktik-praktik kecurangan kecil di dalam kelas, seperti menyontek atau berbohong. Puisi-puisi antikorupsi siswa masih berbicara seputar penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka mungkin belum memahami bahwa perbuatan-perbuatan curang yang mungkin dilakukan di dalam kelas dapat memicu perilaku koruptif dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, penguatan

karakter antikorupsi harus senantiasa dilakukan secara berkelanjutan agar karakter-karakter tersebut tertanam kuat dalam diri siswa.

Penutup

Hasil yang diperoleh dari program ini adalah sebagai berikut. (1) Kemampuan siswa dalam menulis puisi meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan memilih kata, kemampuan memadatkan kata, dan keberanian dalam mengonsep gagasan; (2) Karakter antikorupsi yang dikembangkan dalam proses penulisan puisi antara lain kejujuran, keberanian, kepekaan, dan tanggung jawab. (3) Motivasi siswa dalam menulis puisi meningkat dengan adanya buku antologi puisi yang diterbitkan. Program ini diharapkan dapat senantiasa ditindaklanjuti guna lebih menguatkan karakter antikorupsi siswa sehingga ke depannya, mata rantai korupsi ini sedikit demi sedikit dapat dipupus.

Daftar Pustaka

- Anedo, Onukwube Alex. (2011). "The Place of Poetry in Contemporary Chinese and Igbo Politics". *African Journal of Political Science and International Relations* Vol. 5(6), pp. 271-282, June 2011
- Bura, Romie O dan Nanang T. Puspito. (2011). "Nilai dan Prinsip Anti Korupsi". Dalam *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Ed. Nanang T. Puspito). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Dewantara, I Putu Mas. (2012). "Pendidikan Karakter Antikorupsi: Upaya Menyikapi Realita".
- Indonesia Corruption Watch. (2016). "Kerugian Negara Akibat Korupsi Sebesar 3,1 Triliun". Dalam www.antikorupsi.org. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2016.
- Larmour, Peter. (2006). "Diagnosing The Disease of Corruption: What Different Disciplines Suggest About Curing Corruption. *Policy Briefs Corruption and Anti-Corruption*. Crawford School of Economics and Government.
- Manurung, R. T. (2012). "Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik". *Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11*, Desember 2012.
- Murdiono, M. (2016). "Pendidikan Antikorupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP". *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Edisi Juni 2016, Vol. 15, No. 1
- Mulgan, Richard. (2006). "Democracy and Political Corruption: Idealism Versus Realism". *Policy Briefs Corruption and Anti-Corruption*. Crawford School of Economics and Government.
- Rendra, W.S. (1982). "Saya Punya mental Juara" dalam *Horison* No. 11, 1982, 353 – 361

- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. 2007. *Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. Justice for The Poor Project Bank Dunia.
- Silaen, Friska Yuana dan Hadi Sasana. (2013). “Analisis Determinan Korupsi di Era Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)”. *Diponegoro Journal of Economics* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-6
- Sofia, Asriana Issa. (2011). “Model Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi”. Dalam *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Ed. Nanang T. Puspito). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Srestha, Ananda P. (2000). “Protest Poetry: The Voice of Conciences”. *CNAS Journal* Vol 27, No 2 (July 2000)
- Tanjung, Fahriza Marta. (2009). “Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah. *Makalah*. Disampaikan pada Diskusi Publik “ Memberantas Korupsi melalui Pendidikan “ SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, Universitas Negeri Medan, 21 Februari 2009.
- Transparency International. (2015). “Corruption Perceptions Index 2015”. Dalam www.ti.or.id. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2016.
- Ulya, Chafit, dkk. (2016). ”Muatan Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Kajian dan Apresiasi Puisi di Jawa Tengah dan DIY”. *Journal Indonesian Language Education and Literature* Vol. 2, No. 1, 2016.
- Waluyo, Joko. (2010). “Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara”. *Buletin Ekonomi* Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 70-170.
- Wickberg, Sofia. (2013). “Best Practices in Engaging Youth in The Fight Against Corruption”. *Tranparency International U4 Partner Agency* 16 July 2013 Number: 386.